

## ABSTRAK DAN EXECUTIVE SUMMARY



### **PEMETAAN KESIAPAN PUSKESMAS DI KABUPATEN LUMAJANG DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

KETUA PENELITI

Nama : Nuryadi, S.KM., M.Kes.

NIDN : 0016097206

**UNIVERSITAS JEMBER**

**Nopember 2014**

## **Pemetaan Kesiapan Puskesmas di Kabupaten Lumajang dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional**

Peneliti : Nuryadi<sup>1</sup>

Mahasiswa terlibat : Eka Wahyuni<sup>2</sup>

Sumber dana : BOPTN Universitas Jember

<sup>1</sup> Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember

<sup>2</sup> Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember

### **ABSTRAK**

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mulai dilaksanakan per 1 Januari 2014. Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan *gate keeper* dalam pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pemetaan kesiapan Puskesmas di Kabupaten Lumajang dalam program JKN berdasarkan Standar Puskesmas tahun 2013, dan kesiapan Puskesmas berdasarkan hasil penilaian akreditasi puskesmas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Unit analisis penelitian ini adalah 25 Puskesmas yang ada di wilayah kerja Kabupaten Lumajang. Analisa data untuk standar puskesmas dengan cara menghitung nilai sub total tiap standar dan nilai total tiap puskesmas, sedangkan analisa data untuk penilaian akreditasi dilakukan dengan cara menghitung capaian nilai tiap bab pada masing-masing standar dan capaian nilai akhir dari ke-3 standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan puskesmas di Kabupaten Lumajang dalam program JKN berdasarkan standar manajemen operasional, standar peralatan, standar pelayanan kefarmasian dan obat, standar keuangan, standar upaya KIA-KB, standar upaya pemberantasan penyakit, standar upaya pengobatan, standar upaya penanganan kegawatdaruratan, standar upaya

pengobatan gigi dan mulut, dan standar upaya rawat inap yaitu *sudah baik dan sudah sesuai* standar puskesmas tahun 2013; kesiapan puskesmas berdasarkan standar manajemen mutu, standar bangunan, standar ketenagaan, standar upaya promosi kesehatan, standar upaya kesehatan lingkungan, standar upaya perbaikan gizi masyarakat, standar upaya pencegahan penyakit, standar upaya laboratorium, dan standar upaya kegawatdaruratan obstetri neonatologi yaitu *kurang dan atau cukup, dan belum sesuai* standar puskesmas tahun 2013; kesiapan puskesmas Jatiroto dan Candipuro Kabupaten Lumajang dalam program JKN berdasarkan standar akreditasi puskesmas yaitu belum sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan karena belum memenuhi kriteria untuk terakreditasi dasar. Kesimpulannya bahwa kesiapan puskesmas di Kabupaten Lumajang dalam program JKN berdasarkan standar puskesmas yaitu *cukup dan kurang, dan belum sesuai* standar puskesmas tahun 2013; dan kesiapan puskesmas berdasarkan standar akreditasi puskesmas yaitu belum sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan karena belum memenuhi kriteria untuk terakreditasi dasar.

**Kata Kunci:** Kesiapan Puskesmas, standar puskesmas, akreditasi puskesmas, jaminan kesehatan nasional

## **Pemetaan Kesiapan Puskesmas di Kabupaten Lumajang dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional**

Peneliti : Nuryadi<sup>1</sup>  
Mahasiswa terlibat : Eka Wahyuni<sup>2</sup>  
Sumber dana : BOPTN Universitas Jember  
Kontak email : [nuryadi.fkm@gmail.com](mailto:nuryadi.fkm@gmail.com)  
Diseminasi (jika ada) : Belum ada

<sup>1</sup> Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember

<sup>2</sup> Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember

### **EXECUTIVE SUMMARY**

#### **A. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian**

Pemerintah membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur (Indonesia, 2004). Program jaminan sosial meliputi : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini diimplementasikan dan diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mulai dilaksanakan per 1 Januari 2014.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai *gate keeper* dalam pelayanan kesehatan harus sesuai standar dan wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali (Dinkes Prop Jatim, 2013; Kementerian Kesehatan, 2014).

Selama 4 (empat) bulan berlalunya jaminan kesehatan nasional (JKN), ternyata BPJS kedodoran sebagai pelaksana JKN. Banyak faktor internal dan eksternal BPJS yang harus segera dibenahi agar pelayanan kepesertaan dan kerjasama dengan PPK (penyedia pelayanan kesehatan) dapat berjalan dengan baik. Masalahnya, pembenahan paralel dengan pelayanan bermutu sulit diwujudkan. Kondisi ini berefek tingginya ketidakpuasan peserta terhadap BPJS dan PPK. Peserta JKN benar-benar pada posisi lemah diantara dua pihak yang berkuasa PPK dan BPJS ([Kompasiana](#) tanggal 13 Februari 2014).

Berdasarkan hasil *self assesment* dari 23 puskesmas di wilayah Kabupaten Lumajang yang terkumpul di Dinas Kesehatan bahwa Puskesmas yang memiliki nilai standar puskesmas diatas 80% (baik) sebanyak 8 Puskesmas (34,9%) yaitu puskesmas sukodono, puskesmas jatiroto, puskesmas penanggal, puskesmas kedungjajang, puskesmas rogotrunan, puskesmas gucialit, dan puskesmas labruk. Sedangkan Puskesmas yang memiliki nilai standar di bawah 80 % (belum baik) sebanyak 15 Puskesmas (65,2%) (Wahyuni, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar puskesmas di Kabupaten Lumajang belum mencapai standar sebesar 65,2 % pada tahun 2014, dan menjadi pertanyaan adalah “ *Apakah puskesmas sudah siap dalam menjalankan program JKN* “.

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pemetaan kesiapan Puskesmas di Kabupaten Lumajang dalam program JKN berdasarkan Standar Puskesmas tahun 2013, dan kesiapan Puskesmas berdasarkan hasil penilaian akreditasi puskesmas.

## **B. Metodologi Penelitian Yang Digunakan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Unit analisis penelitian ini adalah 25 Puskesmas di Kabupaten Lumajang. Responden dalam penelitian ini adalah staf seksi pelayanan kesehatan dasar Dinas Kesehatan sebanyak 1 orang, kepala puskesmas sebanyak 2 orang, dan penanggung jawab program kegiatan puskesmas. Variabel penelitian meliputi : pemetaan kesiapan puskesmas berdasarkan standar puskesmas (manajemen dan administrasi, sumber daya, upaya pelayanan kesehatan), kesiapan berdasarkan hasil penilaian akreditasi puskesmas (standar administrasi dan manajemen, program kesehatan, pelayanan medis dasar). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, dan

penyajian data dalam bentuk tabel dan gambar (peta). Analisa data untuk standar puskesmas dengan cara menghitung nilai sub total tiap standar dan nilai total tiap puskesmas, sedangkan analisa data untuk penilaian akreditasi dilakukan dengan cara menghitung capaian nilai tiap bab pada masing-masing standar dan capaian nilai akhir dari ke-3 standar.

### **C. Pemaparan Hasil Penelitian dan Pembahasan Singkat**

Hasil penelitian dan pembahasan singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Kesiapan Puskesmas dalam Program JKN Berdasarkan Standar Administrasi dan Manajemen**

Sebagian besar standar manajemen operasional adalah baik sebanyak 20 Puskesmas (80 %) dari 25 Puskesmas. Dengan demikian, standar ini sudah sesuai dengan standar puskesmas tahun 2013. Kesesuaian tersebut dapat disebabkan oleh sebagian besar puskesmas telah memenuhi parameter pada standar ini. Sementara itu, sebagian besar standar manajemen mutu adalah kurang sebanyak 16 Puskesmas (64 %) dari 25 Puskesmas. Dengan demikian, standar ini belum sesuai dengan standar puskesmas tahun 2013. Ketidak sesuaian tersebut dapat disebabkan oleh sebagian besar puskesmas belum memenuhi parameter pada standar ini.

#### **Kesiapan Puskesmas dalam Program JKN Berdasarkan Standar Sumber Daya**

Sebagian besar standar bangunan adalah cukup dan kurang sebanyak 13 puskesmas (52 %) dari 25 Puskesmas. Di samping itu, sebagian besar standar ketenagaan adalah kurang dan cukup sebanyak 17 puskesmas (68 %) dari 25 Puskesmas. Dengan demikian, kedua standar ini belum sesuai dengan standar puskesmas tahun 2013. Ketidak sesuaian tersebut dapat disebabkan oleh sebagian besar puskesmas belum memenuhi parameter pada standar ini.

Sebagian besar standar peralatan adalah baik sebanyak 14 Puskesmas (56 %), sebagian besar standar pelayanan kefarmasian dan obat adalah baik sebanyak 14 Puskesmas (56 %), dan sebagian besar standar keuangan adalah baik dari 25 Puskesmas. Dengan demikian, ketiga standar ini sudah sesuai dengan standar puskesmas tahun 2013. Kesesuaian tersebut dapat disebabkan oleh sebagian besar puskesmas telah memenuhi parameter pada standar ini.

## **Kesiapan Puskesmas dalam Program JKN Berdasarkan Standar Upaya Pelayanan Kesehatan**

Sebagian besar standar upaya promosi kesehatan adalah cukup dan kurang sebanyak 17 puskesmas (68 %), sebagian besar standar upaya kesehatan lingkungan adalah cukup dan kurang sebanyak 13 puskesmas (52 %), sebagian besar standar upaya perbaikan gizi masyarakat adalah cukup dan kurang sebanyak 14 puskesmas (56 %), sebagian besar standar upaya pencegahan penyakit pada puskesmas di Kabupaten Lumajang adalah cukup dan kurang sebanyak 15 puskesmas (60 %), dan sebagian besar standar upaya laboratorium adalah kurang dan cukup sebanyak 21 puskesmas (84 %) dari 25 Puskesmas. Dengan demikian, kelima standar ini belum sesuai dengan standar puskesmas tahun 2013. Ketidak sesuaian tersebut dapat disebabkan oleh sebagian besar puskesmas belum memenuhi parameter pada standar ini.

Sebagian besar standar upaya KIA-KB adalah baik sebanyak 19 Puskesmas (76 %), sebagian besar standar upaya pemberantasan penyakit adalah baik sebanyak 15 Puskesmas (60 %), sebagian besar standar upaya pengobatan adalah baik sebanyak 21 Puskesmas (84 %), sebagian besar standar upaya penanganan kegawatdaruratan adalah baik sebanyak 14 Puskesmas (56 %), dan sebagian besar standar upaya pengobatan gigi dan mulut adalah baik sebanyak 16 Puskesmas (64 %) dari 25 Puskesmas. Dengan demikian, kelima standar ini sudah sesuai dengan standar puskesmas tahun 2013. Kesesuaian tersebut dapat disebabkan oleh sebagian besar puskesmas telah memenuhi parameter pada standar ini.

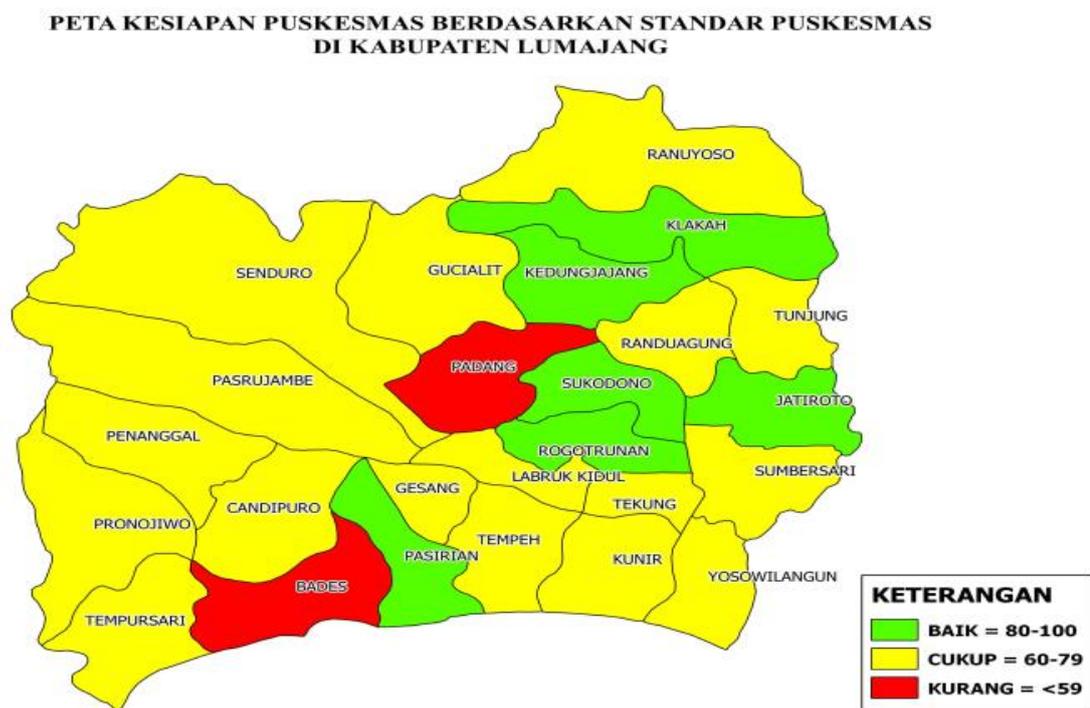
Sebagian besar standar upaya rawat inap adalah baik sebanyak 13 Puskesmas (56,52 %) dari 23 Puskesmas rawat inap dan PONEB. Dengan demikian, standar upaya rawat inap di puskesmas Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan standar puskesmas tahun 2013. Kesesuaian tersebut dapat disebabkan oleh sebagian besar puskesmas telah memenuhi parameter pada standar ini.

Sebagian besar standar upaya kegawatdaruratan obstetri neonatologi adalah cukup dan kurang sebanyak 4 puskesmas (66,67 %) dari 6 Puskesmas PONEB. Dengan demikian, standar upaya kegawatdaruratan obstetri neonatologi di puskesmas Kabupaten Lumajang belum sesuai dengan standar puskesmas tahun

2013. Ketidak sesuaian tersebut dapat disebabkan oleh sebagian besar puskesmas belum memenuhi parameter pada standar ini.

### **Pemetaan Kesiapan Puskesmas dalam Program JKN Berdasarkan Standar Puskesmas**

Kondisi keseluruhan tiap Puskesmas di Kabupaten Lumajang tahun 2013 berdasarkan *self assesment* dapat dilihat dalam peta di bawah ini.



Gambar 1. Peta kesiapan puskesmas berdasarkan standar puskesmas

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kesiapan puskesmas di Kabupaten Lumajang berdasarkan standar puskesmas dalam program jaminan kesehatan nasional adalah cukup dan kurang sebanyak 19 puskesmas (76 %) dari 25 Puskesmas, dengan rincian yaitu puskesmas dengan nilai cukup sebanyak 17 Puskesmas (68 %), dan puskesmas dengan nilai kurang sebanyak 2 puskesmas (8 %). Sedangkan puskesmas dengan nilai baik sebanyak 6 puskesmas (24 %). Dengan demikian, standar puskesmas belum sesuai dengan standar puskesmas tahun 2013. Ketidak sesuaian tersebut dapat disebabkan oleh sebagian besar puskesmas belum memenuhi parameter pada standar puskesmas.

**Kesiapan Puskesmas di Kabupaten Lumajang dalam Program JKN  
Berdasarkan Penilaian Akreditasi Puskesmas**

Adapun hasil penilaian akreditasi di Puskesmas Jatiroto Kabupaten Lumajang yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Nilai Akreditasi Puskesmas Jatiroto dan Candipuro Kabupaten Lumajang, 2014.

NO	BAB	PUSKESMAS JATIROTO			PUSKESMAS CANDIPURO		
		TOT SKOR	SKOR MAKS E.P	CAPAI AN	TOT SKOR	SKOR MAKS E.P	CAPAI AN
	<b>Standar Administrasi dan Manajemen</b>						
1	BAB.I Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)	250	590	42,37%	370	590	62,71%
2	BAB.II Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP).	280	900	31,11%	335	900	37,22%
3	BAB.III Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)	35	320	10,94%	10	320	3,13%
	<b>Standar Program Puskesmas</b>						
4	BAB.IV Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)	150	530	28,30%	55	530	10,38%
5	BAB.V KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).	290	1020	28,43%	160	1020	15,69%
6	BAB. VI Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).	180	460	32,73%	120	460	21,82%
	<b>Standar Pelayanan Medis Dasar</b>						
7	BAB.VII Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).	870	1410	61,70%	620	1410	44,29%
8	BAB.VIII Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).	530	1290	41,09%	385	1290	29,62%
9	BAB.IX Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMPK).	50	580	8,62%	5	580	0,86%
	<b>SKOR TOTAL &amp; SKOR MAKSIMUM E.P</b>	2635	7100		2060	7100	
	<b>CAPAIAN Puskesmas</b>			37,11%			29,01%

Sumber : Data primer terolah, 2014

Capaian nilai total pada standar akreditasi Puskesmas Jatiroto sebesar 37,11 %, dan Candipuro sebesar 29,01 %. Kedua puskesmas tersebut, capaian nilai masing-masing bab I, II, III sebesar < 75 %, capaian nilai masing-masing bab IV, V, VI sebesar < 60 %, dan capaian nilai masing-masing bab VII dan VIII sebesar > 20 % dan IX sebesar < 20 %. Sedangkan penilaian keputusan akreditasi yang terendah adalah Terakreditasi Dasar, dengan kriteria pencapaian nilai Bab I, II, dan III sebesar  $\geq 75$  %, dan Bab IV, V, VI sebesar  $\geq 60$  %, Bab VII, VIII, IX sebesar  $\geq 20$  %. Dengan demikian dari kedua puskesmas tersebut bahwa capaian nilai dari 9 bab hanya bab VII dan VIII yang memenuhi kriteria. Jadi, artinya Puskesmas Jatiroto dan Candipuro belum memenuhi kriteria untuk terakreditasi dasar. Dengan demikian, capaian nilai akreditasi Puskesmas Jatiroto dan Candipuro belum sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan RI. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh sebagian besar standar akreditasi belum memenuhi kriteria.

#### **D. Simpulan Akhir**

Kesimpulannya bahwa kesiapan puskesmas di Kabupaten Lumajang dalam program JKN berdasarkan standar puskesmas yaitu *cukup dan kurang, dan belum sesuai* standar puskesmas tahun 2013; dan kesiapan puskesmas berdasarkan standar akreditasi puskesmas yaitu belum sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan karena belum memenuhi kriteria untuk terakreditasi dasar

#### **E. Kata Kunci**

**Kata Kunci:** Kesiapan Puskesmas, standar puskesmas, akreditasi puskesmas, jaminan kesehatan nasional

#### **F. Daftar Pustaka**

1. Anonim, 2014. *BPJS Kedodoran, Puskesmas Kewalahan!*. <http://kesehatan.kompasiana.com>. (16 April 2014)
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2013. *Standar Puskesmas*. Surabaya : Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
3. Indonesia, 2004. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
4. Kementerian Kesehatan, 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas*.

5. Wahyuni, E., 2014. Analisis Pemetaan Puskesmas di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Standarisasi Puskesmas Tahun 2013. *Laporan Magang*. Jember: FKM Universitas Jember